

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DI BAWAH UMUR YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN**

**NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat

Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Oleh:**

**SRI ROSSIANA**

**C 100.080.123**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2012**

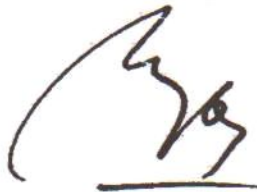
## HALAMAN PENGESAHAN

Naskah publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II

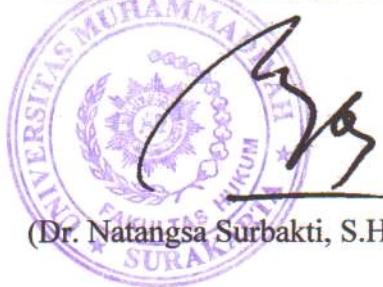


(Hartanto, S.H., M.Hum.)

Mengetahui

a.n. Dekan Fakultas Hukum

Wakil Dekan I Fakultas Hukum UMS



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

**SURAT PERNYATAAN**  
**PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

*Bissillahirrahmanirrohim*

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : SRI ROSSIANA

NIM : C 100.080.123

Fakultas/ Jurusan : HUKUN/ ILMU HUKUM

Jenis : SKRIPSI

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DI BAWAH  
UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
PENCURIAN

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada Perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan saya.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pengkalan data (*database*), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk *softcopy* untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis/pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 20 Oktober 2012

Yang Menyatakan,

  
**Sri Rossiana**

## **ABSTRAK**

Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian. Sri Rossiana C.100.080.123. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan artinya anak yang berhadapan dengan hukum kalau bisa tidak ditahan atau dipenjarakan walaupun dipenjarakan atau ditahan, maka harus dimasukkan dalam ruang tahanan khusus anak dan tidak bersama orang dewasa. Untuk menjamin perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ditetapkan sebagai kelompok anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Dalam pemeriksaan dipersidangan hakim, penuntut umum, penyidik atau petugas lainnya tidak memakai baju toga atau pakaian dinas, sidang tertutup, dan dengan hakim tunggal. Peran hakim dalam hal memeriksa dan memutus perkara anak dengan putusan seadil-adilnya, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan rumah tangga orang tuanya dan keadaan lingkungan dari anak yang bersangkutan dengan tujuan agar anak dapat menyongsong masa depannya dengan sebaik-baiknya.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Anak Pelaku, Tindak Pidana Pencurian

## **ABSTRACT**

Legal Protection for Children Under Age Conducting Crime Theft. Sri Rossiana C.100.080.123. Faculty of Law, Muhammadiyah University of Surakarta.

Children who commit crimes should be treated humanely, accompanied, provided special facilities and infrastructure, the sanctions given to the child in accordance with the principle of the best interests of the child, family relationships were maintained means that children in conflict with the law if you can not be arrested or imprisoned if imprisoned or detained , then it should be included in a special detention of children and not with adults. To ensure the protection of children in conflict with the law defined as a group of children who need special protection. In the examination of the hearing the judge, prosecutor, investigator or other officer not wearing a toga or a dress agency, closed sessions, and the single judge. The role of the judge in the case and rule on cases of children with fairest decision, taking into account and considering the state of his parents' household and environmental circumstances of the child in order for the child to meet his future with the best.

**Keywords:** Protection Law, Child Actors, Theft Crimes

## PENDAHULUAN

Berbicara mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai objek pelaksana pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.<sup>1</sup>

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup>

Kebanyakan masyarakat Indonesia berpikir bahwa anak dan permasalahannya adalah sebatas pada urusan keluarga. Anak baik yang masih di bawah umur maupun yang masih dalam pengawasan orang tuanya adalah juga warga negara Indonesia. Anak termasuk warga negara yang belum dewasa dan tidak memiliki kemampuan hukum atau disebut dengan *consent*. Dan juga tidak mampu dianggap melakukan perbuatan hukum.<sup>3</sup>

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis menentukan perumusan masalah yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian pada fase pemeriksaan pendahuluan, bagaimana peran penegak hukum khususnya hakim dalam

---

<sup>1</sup> Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, hal : 1.

<sup>2</sup> Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>3</sup> Anne Ahira, 2010, *Makalah tentang Hukum Perlindungan Anak*, dalam <http://anneahira.com/2010/10/makalah-tentang-perlindungan-anak/> diunduh Selasa, 20 Maret 2012 pukul 11:35.

memberikan perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian, apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian, apa kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim dalam menjatuhkan putusan perkara anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian pada fase pemeriksaan pendahuluan, untuk mengetahui peran penegak hukum khususnya hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian, untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim dalam menjatuhkan putusan perkara anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama.<sup>4</sup> Anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan artinya anak yang berhadapan dengan hukum kalau bisa tidak ditahan atau dipenjarakan walaupun dipenjarakan atau ditahan, maka harus dimasukkan dalam ruang tahanan khusus anak dan tidak bersama orang dewasa. Untuk menjamin

---

<sup>4</sup> Nashriana, *Op. Cit* hal : 75.

perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum ditetapkan sebagai kelompok anak yang membutuhkan perlindungan khusus.<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran atau fakta.<sup>6</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam suatu masyarakat.<sup>7</sup> Data primer dan data sekunder dikumpulkan dengan cara studi lapangan dan studi pustaka. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi kepustakaan yang berupa buku, makalah, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Bentuk Perlindungan Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Pada Fase Pemeriksaan Pendahuluan**

Perlindungan anak pada proses pemeriksaan pendahuluan yaitu anak yang melakukan kejahatan ditangkap oleh Polisi, maka semenjak itu perlakuan khusus terhadap anak dilakukan. Dalam pemeriksaan pendahuluan, petugas pemeriksa atau penyidik anak harus menjalankan pemeriksaan secara kekeluargaan, ramah

---

<sup>5</sup> Radeen, 2010, *Hak Anak*, dalam <http://radeeen.student.umm.ac.id/2010/07/29/hak-anak/> diunduh Rabu, 21 Maret 2012 pukul 11:48.

<sup>6</sup> Rul, 2010, *Contoh Metode Penelitian Normatif dengan Penelitian Empiris*, dalam <http://rulhome.blog.com/2010/04/11/contoh-metode-penelitian-normatif-dengan-penelitian-empiris> diunduh Sabtu, 24 Maret 2012 pukul 12:25.

<sup>7</sup> Ammirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal: 25.

tamah harus tetap dipelihara dan tidak melakukan pemeriksaan dengan cara yang kasar, paksaan dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Tempat pemeriksaannya pun sebaiknya di tempat atau ruangan yang tertutup, tidak disatukan dengan pemeriksaan orang dewasa, Hal ini dimaksudkan agar anak tidak merasa takut atau grogi pada saat menjawab pertanyaan.<sup>8</sup>

Penahanan pada dasarnya dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, namun penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap melalui konteks kultural dengan tahanan lain.

Dalam memberikan perintah penahanan bagi pelaku tindak pidana yang masih di bawah umur sangat diharapkan agar hati dan perasaan para penegak hukum tergugah untuk lebih memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan serta perlindungan bagi anak. Namun, yang paling penting diharapkan agar penegak hukum tidak ringan tangan dalam melakukan penahanan anak. Penahanan hanya merupakan upaya terakhir dalam menyelesaikan suatu perkara setelah sebelumnya diselesaikan dengan cara lain tidak mendapat jalan keluarnya.<sup>9</sup>

Berbicara mengenai perlindungan anak pada proses pemeriksaan pendahuluan, maka sekarang penulis akan mengkaji mengenai hak-hak anak selama dalam persidangan. Anak selama dalam proses persidangan berhak

---

<sup>8</sup> Erik Sebastian, Polisi, *Wawancara Pribadi*, Sabtu, 29 September 2012, pukul 21:05.

<sup>9</sup> Wagianti Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama. hal: 42.



mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya, berhak didampingi oleh orang tuanya/wali asuhnya, penasihat hukum dan petugas Bapas serta persidangan berlangsung secara tertutup untuk umum.<sup>10</sup>

Sementara bentuk perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pada proses pemeriksaan di persidangan itu sendiri yaitu dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada Pasal 6 yang menyebutkan “*Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas*”. Perlakuan ini dimaksudkan agar anak tidak merasa takut dan seram menghadapi Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum serta petugas lainnya, sehingga dapat mengeluarkan perasaannya pada hakim mengapa ia melakukan suatu tindak pidana. Di samping itu, guna mewujudkan suasana kekeluargaan agar tidak menjadi peristiwa yang mengerikan bagi anak.

Hakim memeriksa perkara anak nakal dalam sidang tertutup. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana tenang, dan penuh dengan kekeluargaan sehingga anak dapat mengutarakan segala peristiwa dan segala perasaannya secara terbuka dan jujur selama sidang berjalan.<sup>11</sup> Dan pemeriksaan sidang anak pada dasarnya dilakukan dengan Hakim Tunggal, bertujuan agar sidang anak dapat diselesaikan dengan cepat.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Diah Astuti, Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, *Wawancara Pribadi*, Pemalang, Jumat, 31 Agustus 2012, pukul 10:04 WIB.

<sup>11</sup> Wigiati Soetodjo, *Op. Cit* hal: 35.

<sup>12</sup> Suprapti, Hakim Pengadilan Negeri Batang, *Wawancara Pribadi*, Batang, Selasa, 4 September 2012, pukul: 10:30 WIB.

### **Peran Penegak Hukum Khususnya Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian**

Pada waktu pemeriksaan perkara anak dimuka sidang, hakim melakukan pendekatan terlebih dahulu terhadap anak dengan cara mencoba bertanya kepada anak, dengan memakai bahasa yang mudah dipahami oleh anak dan dengan pertanyaan yang tidak berhubungan langsung dengan kasus tersebut. Hal ini bertujuan agar anak merasa nyaman dan tidak takut untuk nantinya bisa bercerita dengan sendirinya apa yang telah terjadi.<sup>13</sup>

Hakim dalam sidang anak berperan dalam hal memeriksa dan memutus perkara anak dengan putusan seadil-adilnya, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan rumah tangga orang tuanya atau wali asuhnya, hubungan antar anggota keluarga dan keadaan lingkungan dari anak yang bersangkutan dengan tujuan agar anak dapat menyongsong masa depannya dengan sebaik-baiknya.<sup>14</sup>

### **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian**

Dalam perkara Nomor: 353/Pid.Sus/2011/PN.Pml. Berdasarkan dengan adanya keterangan dari saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan dari para terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum dan semua unsur telah terpenuhi, maka hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”. Adapun hal-

---

<sup>13</sup> Diah Astuti, Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, *Wawancara Pribadi*, Pemalang, Jumat, 31 Agustus 2012, pukul 10:04 WIB.

<sup>14</sup> Shanty Dellyana, 1990, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

hal lain yang harus dipertimbangkan oleh hakim, hal-hal yang memberatkan (perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban) sementara hal-hal yang meringankan (para terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi, para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, para terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya, para terdakwa belum pernah dihukum, para terdakwa masih muda usia, sehingga masih dapat diharapkan untuk dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari, para terdakwa ingin kembali melanjutkan sekolahnya). Di samping hal-hal tersebut hakim juga telah mendengarkan keterangan orang tua para terdakwa dan mendengarkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, maka hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Rumansah alias Asa dengan pidana penjara 3 bulan, sementara terdakwa Khadafi Zulkarnain alias Nain dengan pidana penjara 3 bulan 15 hari.

Dalam perkara Nomor: 218/Pid.Sus/2011/PN.BTG. Berdasarkan adanya keterangan dari para terdakwa, keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan juga telah didengar keterangan orang tua para terdakwa, bahwa dengan semua terpenuhinya unsur-unsur, maka para terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”. Adapun hal-hal lain yang harus dipertimbangkan oleh hakim, hal-hal yang memberatkan (perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat, para terdakwa pernah dihukum), sementara hal-hal yang meringankan (para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, para terdakwa telah memohon keringanan pidana dengan alasan telah menyesal dan tidak akan mengulangi

perbuatannya lagi, para terdakwa masih anak-anak sehingga kepada mereka diperlakukan Undang-Undang Pengadilan Anak), maka hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini yaitu terhadap terdakwa Goris Kuat dan terdakwa Sahri masing-masing dipidana penjara selama 4 bulan.

Sementara dalam perkara Nomor: 09/Pid.Sus/2011/PN.PKL. Berdasarkan adanya keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum dan dakwaan primair yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”. Adapun hal-hal lain yang harus dipertimbangkan oleh hakim, hal-hal yang memberatkan (perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat), sementara hal-hal yang meringankan (terdakwa berterus terang dan berlaku sopan di persidangan, terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih anak-anak sehingga masih dapat memperbaiki perbuatannya di kemudian hari, terdakwa belum menikmati hasilnya), maka hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bagus Mubalegh alias Arok dengan pidana penjara 4 bulan.

### **Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian**

Dalam perkara Nomor: 353/Pid.Sus/2011/PN.Pml, menurut Hakim yang menangani perkara ini, terdakwa anak merasa takut pada saat proses pemeriksaan di persidangan karena mungkin terdakwa anak belum pernah berhadapan

langsung dengan Hakim, Penuntut Umum, Penyidik atau Petugas lainnya, sehingga Hakim agak kesulitan dalam mencari keterangan secara langsung dari terdakwa anak tersebut.<sup>15</sup>

Dalam perkara Nomor: 218/Pid.Sus/2011/PN.BTG, menurut Hakim yang menangani perkara ini, mengatakan tidak ada kendala apapun dalam menjatuhkan putusan perkara tersebut. Karena dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bisa dengan bukti-bukti yang diajukan dimuka sidang, keterangan saksi-saksi, laporan hasil penelitian dari Balai Pemasyarakatan. Walaupun terdakwa anak tidak mau berbicara dimuka sidang, penjatuhan pidana terhadap terdakwa anak tetap dilaksanakan agar tidak terlalu lama.<sup>16</sup>

Sementara dalam perkara nomor: 09/Pid.Sus/2011/PN.PKL, menurut Hakim yang menangani perkara ini, yaitu pada saat proses persidangan orang tua terdakwa tidak mau datang, dengan alasan karena malu anaknya telah melakukan tindak pidana pencurian. Dan terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum.<sup>17</sup>

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pertama, bentuk perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian pada fase pemeriksaan pendahuluan yaitu dalam pemeriksaan pendahuluan penyidik anak harus menjalankan pemeriksaan secara kekeluargaan, ramah dan tidak melakukan pemeriksaan dengan cara yang

---

<sup>15</sup> Diah Astuti, Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, *Wawancara Pribadi*, Pemalang, Jumat, 31 Agustus 2012, pukul 10:04 WIB.

<sup>16</sup> Suprpti, Hakim Pengadilan Negeri Batang, *Wawancara Pribadi*, Batang, Selasa, 4 September 2012, pukul: 10:30 WIB.

<sup>17</sup> Ninik Hendras Susilowati, Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, Rabu, 12 september 2012, pukul 10:00 WIB.

kasar, paksaan dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak dan tempat pemeriksaannya harus tertutup serta dipisahkan dari pemeriksaan orang dewasa. Sementara bentuk perlindungan hukum dalam pemeriksaan dipersidangan Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas, sidang tertutup dan hakimnya tunggal.

Kedua, peran penegak hukum khususnya hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian yaitu dalam hal memeriksa dan memutus perkara anak, hakim berperan dalam menjatuhkan putusan seadil-adilnya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan rumah tangga orang tuanya atau wali asuhnya, hubungan antar anggota keluarga dan keadaan lingkungan dari anak yang bersangkutan dengan tujuan agar anak dapat menyongsong masa depannya dengan sebaik-baiknya.

Ketiga, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu dalam perkara Nomor: 353/Pid.Sus/2011/PN.Pml, perkara Nomor: 218/Pid.Sus/2011/PN.BTG serta perkara Nomor: 09/Pid.Sus/2011/PN.PKL, yakni dengan adanya keterangan dari saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan dari para terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”. Adapun hal-hal lain yang harus dipertimbangkan oleh hakim, hal-hal yang memberatkan dalam perkara Nomor: 353/Pid.Sus/2011/PN.Pml (perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban) sementara hal-hal yang meringankan (para terdakwa menyesali dan mengakui

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, para terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya, para terdakwa belum pernah dihukum, para terdakwa masih muda usia, sehingga masih dapat diharapkan untuk dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari, para terdakwa ingin kembali melanjutkan sekolahnya). Di samping hal-hal tersebut hakim juga telah mendengarkan keterangan orang tua para terdakwa dan mendengarkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, maka hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Rumansah alias Asa dengan pidana penjara 3 bulan, sementara terdakwa Khadafi Zulkarnain alias Nain dengan pidana penjara 3 bulan 15 hari.

Dalam perkara Nomor: 218/Pid.Sus/2011/PN.BTG, hal-hal yang memberatkan (perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat, para terdakwa pernah dihukum), sementara hal-hal yang meringankan (para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, para terdakwa telah memohon keringanan pidana dengan alasan telah menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, para terdakwa masih anak-anak sehingga kepada mereka diperlakukan Undang-Undang Pengadilan Anak), maka hakim menjatuhkan putusan dalam perkara ini yaitu terhadap terdakwa Goris Kuat dan terdakwa Sahri masing-masing dipidana penjara selama 4 bulan.

Sementara dalam perkara Nomor: 09/Pid.Sus/2011/PN.PKL, hal-hal yang memberatkan (perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat), sementara hal-hal yang meringankan (terdakwa berterus terang dan berlaku sopan di persidangan, terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih anak-anak sehingga masih

dapat memperbaiki perbuatannya di kemudian hari, terdakwa belum menikmati hasilnya), maka hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bagus Mubalegh alias Arok dengan pidana penjara 4 bulan.

Keempat, kendala yang dihadapi oleh hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu dalam perkara Nomor: 353/Pid.Sus/2011/PN.Pml terdakwa anak merasa takut pada saat proses pemeriksaan di persidangan sehingga hakim agak kesulitan dalam mencari keterangan secara langsung dari terdakwa anak tersebut. Dan dalam perkara Nomor: 218/Pid.Sus/2011/PN. BTG, tidak ada kendala apapun dalam menjatuhkan putusan perkara tersebut, karena dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bisa dengan bukti-bukti yang diajukan dimuka sidang, keterangan saksi-saksi, laporan hasil penelitian dari Balai Pemasyarakatan. Walaupun terdakwa anak tidak mau berbicara dimuka sidang, penjatuhan pidana terhadap terdakwa anak tetap dilaksanakan agar tidak terlalu lama. Sementara dalam perkara Nomor: 09/Pid.Sus/2011/PN.PKL pada saat proses persidangan orang tua terdakwa tidak mau datang, dengan alasan karena malu anaknya telah melakukan tindak pidana pencurian. Dan terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum.

### **Saran**

Pertama, dalam hal memberikan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana, hakim anak harus bisa lebih memahami karakter si anak.

Kedua, sebaiknya terhadap penegak hukum khususnya hakim anak tidak menjadikan suatu alasan bahwa tidak tersedianya penasihat hukum bagi anak



pelaku tindak pidana menjadi suatu kendala dan sudah menjadi kewajiban dari hakim untuk menyediakan penasihat hukum bagi terdakwa anak dalam sidang pengadilan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ammirudin dan Asikin, Zainal 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dellyana, Shanty, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Soetodjo, Wigiati, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama.
- Ahira, Anne, 2010, *Makalah tentang Hukum Perlindungan Anak*, dalam <http://anneahira.com/2010/10/makalah-tentang-perlindungan-anak/> diunduh Selasa, 20 Maret 2012 pukul 11:35.
- Radeen, 2010, *Hak Anak*, dalam <http://radeeen.student.umm.ac.id/2010/07/29/hak-anak/> diunduh Rabu, 21 Maret 2012 pukul 11:48.
- Rul, 2010, *Contoh Metode Penelitian Normatif dengan Penelitian Empiris*, dalam <http://rulhome.blog.com/2010/04/11/contoh-metode-penelitian-normatif-dengan-penelitian-empiris/> diunduh Sabtu, 24 Maret 2012 pukul 12:25.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.